



Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998

Alphonsius Rodriquest Eko. W¹, Kurniawati², M. Hasmi Yanuardi³, Maulani⁴
¹²³⁴Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta
E-mail: alvoncozzy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penelitian bertujuan untuk mengetahui keterlibatan militer dalam konflik internal PDI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yakni terdiri dari pengumpulan sumber, verifikasi/kritik sejarah, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terlibatnya militer dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia tidak lepas peran Jenderal A.H.Nasution. Puncak dari campur tangan ABRI dalam konflik internal PDI adalah dengan terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Konflik yang melibatkan DPP PDI Megawati dan DPP PDI Soerjadi ini diduga juga melibatkan pihak eksternal partai, khususnya pemerintah dan ABRI. Dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 dirasakan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, ABRI, PDI dan bahkan masyarakat

Kata kunci: Dwifungsi, ABRI, PDI

ABRI Dual Function in Internal Conflict of PDI 1976-1998

Abstract: *This study examines the implementation of the dual concept of ABRI in the internal conflict of the Indonesian Democratic Party (PDI). The research aims to determine the involvement of the military in the internal conflicts of the PDI. The research method used in this study is the historical method, which consists of collecting sources, verifying / critique history, interpretation, and historiography. The results showed that the involvement of the military in socio-political life in Indonesia could not be separated from the role of General A.H.Nasution. The peak of ABRI's interference in the PDI internal conflict was the 27 July 1996 incident. The conflict involving the Megawati PDP Megawati and the Soerjadi PDI was allegedly also involving external parties, especially the government and ABRI. The impact of the July 27, 1996 incident was felt by all parties involved, both the government, ABRI, PDI and even the community*

Keywords: *Dual Function, ABRI, PDI*

Pendahuluan

Pada masa Orde Baru kesempatan ABRI untuk memiliki peran dalam kegiatan politik negara semakin terbuka. Hal tersebut tidak lepas dari visi dan misi lahirnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Visi dan misi tersebut adalah melakukan perbaikan dan pembaharuan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Orde Lama. Sebab itu Jenderal Soeharto bertekad tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Presiden Soekarno yang memusatkan kekuasaan ditangannya (Soeharto, 1985: 8).

Sejak masa Orde Baru, ABRI secara nyata diakui sebagai kekuatan sosial politik tersendiri disamping partai-partai politik yang ada. Namun tidaklah tepat bila dalam penyelenggaraan negara modern yang mengedepankan spesialisasi, fungsionalisasi dan akuntabilitas, ABRI dibenarkan menjalankan banyak fungsi. Contohnya adalah ketika ABRI dijadikan alat pemerintah untuk mencampuri masalah internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di dalam menentukan pemimpin partai yang patuh terhadap pemerintah, Presiden Soeharto sering kali menggunakan ABRI untuk mengurusnya. Hal itu justru dapat melemahkan profesionalisme ABRI dan menyebabkan fungsi yang tumpang tindih karena peran ABRI dalam pemerintahan Presiden Soeharto mencakup berbagai aspek kehidupan tanpa ruang lingkup yang jelas.

Strategi yang digunakan Jenderal Soeharto untuk mendirikan pemerintahan Orde Baru adalah dengan menggunakan kekuatan militer, khususnya Angkatan Darat. Jenderal Soeharto mengumpulkan kekuatan pada Angkatan Darat (AD) dengan mendasarkan pada konsep Dwifungsi ABRI versi pemerintahan Orde Baru, karena Jenderal Soeharto ingin mengubah struktur politik Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh sipil menjadi didominasi oleh militer (Singh, 1996: 64).

Berkat konsep Dwifungsi ABRI, Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik bergerak secara bersamaan, seperti banyaknya petinggi Angkatan Darat yang diizinkan untuk memegang posisi penting di dalam pemerintahan dan termasuk dalam mencampuri urusan partai politik. Alasan Jenderal Soeharto mengontrol penuh Angkatan Darat, karena Jenderal Soeharto membutuhkan kekuatan pendukung agar dapat mempertahankan kekuasaannya. Selain itu diawal berdirinya pemerintahan Orde Baru, pengaruh partai politik pada masa itu masih sangat besar.

Pemerintah sendiri beralih jika keterlibatan ABRI dalam urusan internal partai bertujuan untuk mewujudkan stabilitas politik Indonesia. Sebab itu pemerintah memberikan tanggung jawab tersebut kepada ABRI. Tanggung jawab tersebut menjadikan ABRI bertindak “agresif” terhadap semua yang dianggapnya membahayakan stabilitas (Magalela, 1999: 159). Termasuk orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui apa yang melatarbelakangi dan makna dari munculnya konsep Dwifungsi ABRI, bagaimana awal mula bentuk campur tangan militer dalam partai politik sebelum melakukan fusi pada tahun 1973 dan bagaimana campur tangan militer dalam konflik internal PDI 1976-1998.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Dwi Fungsi ABRI

Dwifungsi ABRI dalam Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966-1971 karya Maria Margareta Widayanti mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penelitian tersebut hanya membahas pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Pemilu 1971. *Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial-Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1997* karya Febrinita Dwi Istyaningrum mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universtias Negeri Semarang (UNNES) tahun 2004. Penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana peran ABRI dalam mendirikan pemerintahan Orde Baru.

Perkembangan Partai Demokrasi Indonesia 1976-1981 karya Catharina Haryo Soedirjo mahasiswi program studi ilmu politik Universitas Indonesia tahun 1982. Pada Penelitian ini tidak membahas keterlibatan militer dalam konflik internal PDI dan hanya membahas perkembangan PDI dari awal berdirinya partai pada tahun 1973 sampai tahun 1981. *Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia 1986-1993* karya Willy Purna Samadhi Mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Indonesia tahun 1994. Penelitian ini hanya membahas konflik internal PDI tahun 1986-1993 dan tidak menjelaskan adanya campur tangan militer dalam konflik tersebut.

Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin yang menyatakan ABRI (sekarang TNI) memiliki dua tugas yaitu menjaga keamanan negara dan peran sosial politik angkatan bersenjata. Kebenaran jika anggota parlemen ikut mencampuri urusan dalam tubuh Angkatan Darat terjadi setelah dilantiknya Kabinet Ali Sastroamidjojo pada bulan Juli 1953. Saat jabatan Menteri Pertahanan diserahkan kepada Iwa Kusumasumantri yang dikenal anti-Nasution dan kelompoknya. Selanjutnya Iwa Kusumasumantri langsung mengangkat para perwira

yang anti- Nasution tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kolonel A.H.Nasution. Tindakan Iwa menurut Angkatan Darat dianggap mencampuri urusan internal tentara. Hal yang paling tidak disukai oleh Angkatan Darat adalah ketika ada kebijakan Iwa yang ingin mempersenjatai kelompok non-militer atas tuntutan organisasi veteran komunis, dengan alasan untuk menumpas pemberontakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat.

Munculnya Peran Sosial Politik ABRI

Pada pertengahan tahun 1958, akibat keberhasilan tentara mengatasi pemberontakan PRRI-PERSEMESTA di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara, posisi politik Angkatan Darat menjadi semakin kuat, hal ini berbanding terbalik dengan kekuatan politik partai yang justru semakin merosot. Kemerosotan kekuatan politik partai-partai sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1956 ketika Lukas Kustarjo, mantan perwira Siliwangi yang duduk di Parlemen sebagai wakil Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), menyatakan pada tanggal 24 Oktober 1956 bahwa militer tidak lagi menghormati para politisi sipil. Sikap tersebut menunjukkan jika dikalangan Angkatan Darat berkeinginan untuk mengembangkan perombakan radikal terhadap sistem Demokrasi Parlemerter. Namun pada pelaksanaannya terdapat dua alur pandangan dalam militer. Satu pihak ingin mendirikan junta militer, sedangkan sisanya masih berharap para politisi bertindak jujur dan sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan orang banyak. Jika harapan para perwira tersebut dikecewakan oleh para politisi sipil, mereka bertekad untuk mendirikan pemerintahan Soekarno, Hatta dan Militer (Said, 2002: 13).

Semakin dekatnya hubungan Presiden Soekarno dengan Mayjen A.H.Nasution semakin memberikan angkatan bersenjata kesempatan untuk menjalankan peran sosial politiknya. Di tambah lagi keberhasilan Mayjen A.H.Nasution dalam memberantas pemberontakan PRRI-PERSEMESTA menimbulkan efek dalam tubuh angkatan bersenjata. Pertama, tersingkirnya beberapa perwira radikal. Mereka yang dimaksud perwira radikal adalah yang melakukan pemberontakan didaerah-daerah. Kedua, Angkatan bersenjata kini memiliki posisi yang lebih kuat di dalam pemerintahan, ditambah dengan berlakunya undang-undang S.O.B. Mayjen A.H.Nasution selaku pimpinan tertinggi Angkatan Darat memiliki dua tujuan meningkatkan peran politik tentara. Pertama, ia ingin mengurangi peranan partai politik. Kedua, ingin menjadikan peranan angkatan bersenjata bersifat permanen.

Landasan Dwi Fungsi ABRI

Landasan hukum Dwifungsi ABRI, sudah ada ketika dibentuknya UU No.7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional pada 12 Mei 1957. Di dalam undang-undang tersebut, para Kepala Staf tiga angkatan (KSAD, KSAL dan KSAL) dan Kepala Kepolisian dimasukkan kedalam anggota Dewan Nasional. Sejak saat itu dapat dikatakan anggota militer mendapat pengakuan secara *de facto* sebagai kekuatan sosial politik disamping kekuatan sosial lainnya.

Pada perkembangan berikutnya dibentuk Undang-undang No.80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional pada tanggal 23 Oktober 1958 yang isinya adalah mengatur militer masuk sebagai anggota Dewan Perancang Nasional dan menjadi golongan fungsional. Undang-undang tersebut dirancang oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semenjak saat itu militer Indonesia mendapat pengakuan *yuridis* sebagai kekuatan sosial politik.

Landasan hukum Dwifungsi ABRI semakin kuat dengan adanya Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Petahanan Keamanan Negara. Undang-undang terakhir sebagai landasan hukum konsep Dwifungsi ABRI adalah Undang-undang No.2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI yang ditegas dalam 6 pasal. Hal yang paling mencolok dari Undang-undang ini terdapat pada Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa Prajurit ABRI bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Fattah, 2005: 150).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yakni terdiri dari pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi/ kritik sejarah, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini akan disajikan menggunakan model deskriptif naratif.

Heuristik merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapat data dari materi sejarah. Sumber yang dicari harus sesuai dengan peristiwa sejarah yang bersangkutan. Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar yang berhubungan dengan konflik internal PDI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang Dwifungsi ABRI dan PDI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia (PERPUSNAS), UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), dan Perpustakaan pendidikan sejarah di LT.4 Fakultas Ilmu Sosial.

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti melakukan kritik pada data yang telah terkumpul dan sumber-sumber tersebut akan dikaji. Kritik dilakukan secara intern dan ekstern. Kritik secara intern untuk menguji kredibilitas sumber tersebut, dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Sedangkan kritik secara ekstern untuk menguji otentisitas dalam penelitian dilakukan dengan cara mencari data mengenai kapan, di mana, siapa, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah sumber tersebut dalam bentuk asli.

Interpretasi adalah berupa analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta yang tampaknya terlepas antara satu sama lain bisa menjadi hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyikapi peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Historiografi merupakan cara penulisan pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Penelitian sejarah hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai fase penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah terbentuknya partai politik hasil fusi 1973, terjadilah dua konsekuensi buruk bagi partai politik dimasa Orde Baru. Pertama, Posisi partai politik menjadi begitu bergantung pada pemerintah. Kedua, akibat adanya fusi menjadikan partai politik sulit menjelaskan kehadirannya dihadapan tata politik nasional. Pasca terbentuk, PDI selalu dihadapkan pada berbagai masalah, seperti konflik internal, masalah kemandirian dan demokratisasi, identitas partai dan kaderisasi (Elisabet Sukamto, Adriana, 1991: 54)

Konflik internal dalam tubuh PDI pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bentuk. Pertama, konflik antar unsur partai. Kedua, konflik ditingkat pimpinan partai (DPP) (Artikel Prisma, 1991: 321). Sumber konflik terbesar dalam tubuh PDI berasal dari tingkat pimpinan (DPP). Sedangkan pimpinan DPP PDI mayoritas diisi oleh mantan anggota PNI. Konflik yang melibatkan tokoh-tokoh PNI mengandung duadimensi, yaitu dimensi

“konflik warisan” dan dimensi “kepentingan pribadi”. Pada dimensi “konflik warisan” ada dua kubu yang saling berhadap-hadapan, yakni kubu radikal dan kubu kompromis (Elisabet Sukamto, Adriana, 1991: 55). Seperti biasa, pada masa Orde Baru kubu-kubu radikal pasti akan selalu dapat disingkirkan karena terkadang dianggap ancaman oleh pemerintah.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah tentang massa mengambang dan dikeluarkannya RUU tentang organisasi partai politik dan prosedur Pemilihan Umum. Rancangan undang-undang tersebut isinya melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai (selain Golkar) dan membatasi pilihan dasar ideologi partai, yaitu hanya Pancasila dan UUD 1945 (Jenkins, 2010: 52). Partai politik juga dilarang untuk memiliki satuan sampai tingkat desa. PDI yang terbentuk dari gabungan partai politik dengan pengaruhnya yang mengakar sampai pada masyarakat jelas kehilangan basis dukungannya karena kebijakan ini (Zulkifli, 1996: 598).

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah konflik terbuka pertama yang melibatkan tentara dengan politisi sipil. Konflik disebabkan karena parlemen sementara (DPRS) berusaha untuk mencampuri internal tentara tentang program modernisasi yang digagas oleh Kolonel A.H. Nasution (Said, 2001: 10). Gagasan tersebut ditentang oleh perwira hasil didikan PETA (Pembela Tanah Air), sehingga didalam tubuh tentara terdapat persaingan antara perwira didikan PETA yang diwakili oleh Kolonel Bambang Supeno dengan perwira didikan KNIL (Koninklijke Nederlandsch Indische Leger) yang diwakili oleh Kolonel A.H. Nasution. Perwira didikan PETA adalah orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka tidak heran apabila mereka sangat didukung oleh Presiden Soekarno (Muhaimin, 2002: 74).

Menilai gagasan Kolonel A.H. Nasution yang dianggap telah menyimpang dari tujuan revolusi, pada tanggal 13 Juli 1952 Kolonel Bambang Supeno mengirim surat kepada Menteri Pertahanan dan Komisi Parlemen. Isi surat itu menyatakan jika Kolonel Bambang Supeno tidak menaruh kepercayaan lagi terhadap Kolonel A.H. Nasution sebagai atasannya. Surat tersebut berdampak dengan dipecatnya Kolonel Bambang Supeno.

Namun tidak hanya dari kalangan tentara yang tidak setuju dengan gagasan Kolonel A.H. Nasution, gagasan tersebut juga ditolak partai politik yang ada pada saat itu. Menanggapi reaksi partai politik, pada tanggal 16 Oktober 1952 diadakan satu rapat staf umum Angkatan Darat dengan para panglima teritorialnya yang ada diseluruh Indonesia. Hasil rapat tersebut adalah sebuah petisi kepada Presiden Soekarno yang ditandatangani

oleh KSAD beserta tujuh panglima daerah dan delapan pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Inti dari petisi tersebut adalah Angkatan Darat ingin, Presiden Soekarno membubarkan parlemen.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 pagi hari, di Jakarta bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran, KSAD Kolonel A.H.Nasution memerintah Mayor Kemal Idris untuk mengarahkan laras meriamnya ke Istana merdeka. Angkatan Darat pada hari itu mencoba, tetapi gagal untuk mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen (Haji Salim, 2016:26). Akibat perbuatannya yang dianggap akan melakukan kudeta, Kolonel A.H.Nasution dan anak buahnya disingkirkan Presiden Soekarno dari jabatan penting Angkatan Darat. Semenjak saat itu posisi tentara menjadi melemah terhadap pihak mana saja dalam arena politik. Posisi yang lemah inilah yang menjadi akar dari konflik-konflik lain antara tentara dan pemerintah dikemudian hari.

Cikal-bakal menguatnya peran sosial-politik ABRI berawal dari persamaan sikap antara Presiden Soekarno dengan Mayjen A.H.Nasution tentang keberadaan partai politik diakhir tahun 1950. Di waktu yang tepat ini juga, Mayjen A.H.Nasution mencurahkan isi hati tentara yang dituangkan dalam pidatonya di Akademi Militer Magelang pada bulan November 1958. Bagi Mayjen A.H.Nasution, tentara Indonesia akan memainkan "Jalan Tengah", tidak akan melakukan kudeta militer dan tidak hanya diam saja menjadi penonton dalam arena politik. Nasution mau tentara diberikan kesempatan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan atas dasar individu bukan organisasi dan membiarkan keahliannya di bidang non-militer dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa.

Gagasan tersebut dikabulkan oleh Presiden Soekarno dalam sidang Dewan Nasional ke-12 dari tanggal 12-21 November 1958 dengan mengesahkan angkatan bersenjata sebagai salah satu golongan karya dan kemudian menjadi anggota dalam Dewan Perancangan Nasional (Said, 2002: 36). Tindakan tersebut merupakan bukti pengakuan pemerintah secara de facto sekaligus de jure terhadap fungsi angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial-politik (Soebijono, 1993: 24-25).

Adanya pengakuan dari pemerintah kepada tentara sebagai kekuatan sosial politik, membuat Mayjen A.H.Nasution semakin ingin menguatkan peran sosial-politik tentara. Setelah berhasil memperbaharui doktrin-doktrin militer dan memperkuat kontrol di daerah-daerah dengan keberadaan Panglima Daerah, Mayjen A.H.Nasution sebagai orang terkuat nomor dua di Indonesia ingin mengubah sistem Demokrasi Liberal dengan sistem Presidensial lewat pemberlakuan kembali UUD 1945.

Namun setelah Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintah menjadi Demokrasi Terpimpin, hubungan baik antara Presiden Soekarno dan Mayjen A.H.Nasution justru memburuk. Penyebabnya adalah perbedaan pendapat mengenai konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis, Komunis). A.H.Nasution yang merupakan seorang anti-komunis, lantas disingkirkan dari jabatan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) pada tahun 1962 dan digantikan oleh Mayjen Ahmad Yani.

Munculnya Jenderal Soeharto di puncak tertinggi kekuasaan Angkatan Darat ditambah dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) menandai munculnya masa Orde Baru di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto. Dimasa Orde Baru dengan berlandaskan dengan konsep Dwifungsi ABRI, Angkatan Darat dijadikan alat kekuasaan Jenderal Soeharto dengan dalih demi menjaga stabilitas politik.

Melihat partai politik sebagai sumber kehancuran negara di masa Orde Lama ditambah lagi Presiden Soeharto masih melihat partai-partai besar seperti NU dan PNI sebagai ancaman, Presiden Soeharto berupaya untuk melemahkan kekuatan partai politik. Langkah tersebut didukung oleh banyak perwira Angkatan Darat karena rata-rata dari mereka memang tidak suka dengan keberadaan partai politik.

Bahkan ada perwira Angkatan Darat yang bersikap sangat keras terhadap partai politik seperti Jenderal H.R.Dharsono dan Jenderal Kemal Idris. Kedua Jenderal Angkatan Darat tersebut dianggap radikal oleh Presiden Soeharto karena sikap kerasnya terhadap partai politik. Lagi pula untuk melemahkan kekuatan partai politik, Presiden Soeharto lebih ingin menggunakan pendekatan persuasif agar kondisi politik tetap stabil. Akibat sikap kerasnya, H.R.Dharsono dan Kemal Idris disingkirkan dari pusat kekuasaan Presiden Soeharto (Jenkins, 2010: 46).

Di dalam memperlemah pengaruh partai politik pada saat itu, Presiden Soeharto banyak mengandalkan Angkatan Darat. Lewat operasi militer yang dijalankan oleh Bakin dibawah pimpinan Ali Moertopo, pemerintah Orde Baru sukses menempatkan orang-orang pilihannya ke dalam partai politik. Tujuannya adalah untuk mengganti pemimpin partai yang dianggap radikal dan anti-pemerintah. Sedangkan untuk mengurangi jumlah dukungan terhadap partai politik di daerah-daerah, Presiden Soeharto sangat mengandalkan Panglima Daerah setempat untuk melakukan tekanan dan intimidasi kepada para pendukung partai.

Tindakan-tindakan pemerintah yang meminjam tangan Angkatan Darat tersebut berhasil dilakukan. Dampaknya adalah dari sembilan partai politik seperti PNI, Parkindo,

Partai Katolik, Murba, IPKI, NU, Parmusi, Perti dan PSII, berhasil dilebur menjadi hanya dua partai saja, yakni PPP dan PDI. Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari unsur NU, Parmusi, Perti dan PSII berdiri pada 5 Januari 1973. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari unsur PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI didirikan pada 10 Januari 1973.

Konflik internal dalam tubuh PDI pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bentuk. Pertama, konflik antar unsur partai. Kedua, konflik ditingkat pimpinan partai (DPP) (Prisma, 1991, h.321). Sumber konflik terbesar dalam tubuh PDI berasal dari tingkat pimpinan (DPP). Sedangkan pimpinan DPP PDI mayoritas diisi oleh mantan anggota PNI. Konflik yang melibatkan tokoh-tokoh PNI mengandung dua dimensi, yaitu dimensi “konflik warisan“ dan dimensi “kepentingan pribadi”. Pada dimensi “konflik warisan“ ada dua kubu yang saling berhadap-hadapan, yakni kubu radikal dan kubu kompromis (Sukanto, 1991: 55). Seperti biasa, pada masa Orde Baru kubu-kubu radikal pasti akan selalu dapat disingkirkan karena terkadang dianggap ancaman oleh pemerintah.

Konflik internal PDI pertama kali terjadi dimasa kepemimpinan Sanusi Hardjadinata 1976-1982. Konflik terbesar PDI dimasa kepemimpinan Sanusi (PNI) terjadi ketika adanya tindakan reshuffle yang dilakukan oleh Akhmad Sukarmadidjaja (Murba). Akhmad Sukarmadidjaja menilai tindakan Sanusi yang menyingkirkan para pengikut Isnaeni-Sunawar (PNI) sebagai tindakan diktator. Memang pada saat itu keberadaan Isnaeni-Sunawar memang kerap kali memunculkan konflik dalam tubuh PDI, oleh sebab itu Sanusi berusaha untuk menyingkirkan sumber konflik tersebut.

Dampak dari adanya tindakan reshuffle yang dilakukan Akhmad Sukarmadidjaja adalah memunculkan dua kubu yang berseteru, yakni DPP Kongres I diwakili Sanusi melawan DPP PDI reshuffle yang diwakilkan oleh Isnaeni-Sunawar. Dalam mendamaikan dua kubu yang berkonflik tersebut, pemerintah kerap kali melibatkan ABRI lewat Laksamana Soedomo sebagai Kakopkamtib dan Mayjen Yoga Soegama.

Konflik internal PDI yang terjadi dimasa kepemimpinan Sanusi Hardjadinata berakhir ketika Sanusi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PDI. Sanusi merasa telah dikhianati pemerintah dan menilai campur tangan pemerintah dalam internal PDI sangat besar. Berkat mundurnya Sanusi, Laksamana Soedomo yang pada saat itu ditugaskan untuk menyelesaikan konflik internal PDI, berhasil menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Campur tangan militer dalam konflik internal PDI tak hanya berhenti sampai disitu. Dimasa kepemimpinan Sunawar Sukowati (1982-1986), ABRI mengorbitkan Hardjantho sebagai lawan tandingan Sunawar Sukowati. Walaupun Sunawar Sukowati bukan orang yang anti-Dwifungsi ABRI, tetapi pidatonya didepan F-PDI yang mengatakan jika Indonesia adalah negara sekuler dianggap sangat berbahaya.

Akibatnya kembali muncul dua kutub kekuatan yang berkonflik, yakni DPP PDI Negara Sekuler di bawah pimpinan Sunawar dan DPP PDI Pancasila di bawah pimpinan Hardanjantho. Konflik ini bertahan lebih dari satu tahun sampai memasuki Kongres III. Namun dimasa kepemimpinan Sunawar Sukowati, keterlibatan ABRI dalam konflik internal PDI sedikit berkurang. Keterlibatan ABRI yang terlihat ketika diselenggarakannya Kongres III PDI pada 15-17 April 1986. Di dalam kongres tersebut ada pengamanan super ketat dari ABRI. Banyak perwira berpangkat Letkol dari Laksus Jaya hadir dan melakukan pengamanan dalam kongres tersebut.

Selanjutnya setelah Kongres III PDI berakhir, PDI dipimpin oleh orang-orang pilihan pemerintah yang didominasi oleh golongan muda. Saat itu PDI memasuki era baru dibawah Ketua Umum Partai, Soerjadi. Diawal kepemimpinannya Soerjadi banyak melakukan gebrakan, termasuk memasukan Purnawiraman ABRI dan yang paling fenomenal adalah hadirnya Megawati di dalam PDI. Tujuannya adalah untuk menarik dukungan massa agar mendukung PDI dalam Pemilu 1987.

Setelah Pemilu 1987 berhasil dilaksanakan, untuk memberikan apresiasi kepada Megawati karena perannya begitu besar bagi PDI dalam Pemilu 1987, maka PDI mencalonkan Megawati sebagai calon anggota DPR yang mewakili PDI. Akhirnya tahun 1988, Megawati dan Suaminya Taufik Kiemas dilantik menjadi anggota DPR. Saat itu, Megawati-Kiemas adalah satu-satunya pasangan yang sama-sama menjadi anggota DPR (Bahar, 1996: 32). Sebagai anggota DPR yang relatif baru, tidak banyak hal yang dilakukan Megawati. Bahkan ia banyak dinilai orang-orang tidak banyak melakukan gebrakan seperti para politikus lainnya. Maka wajar jika kemudian banyak diantara lawan politikya mengejek Megawati. Walaupun banyak yang meragukan kemampuannya, Megawati banyak belajar dari Bung Karno. Hal yang banyak ia pelajari terutama tentang wawasan politik dan kebangsaan. (Bahar, 1996: 33)

Dimasa ini juga terlihat perubahan sikap dari ABRI di bawah kepemimpinan Jenderal Benny Moerdani. Di bawah kepemimpinan Jenderal Benny Moerdani, ABRI memilih untuk bersikap netral diatas semua golongan. Bahkan Benny Moerdani diketahui

sangat dekat hubungannya dengan PDI. Penyebabnya adalah merenggangnya hubungan ABRI dengan Golkar (Salim, 2016: 136-139).

Sikap Jenderal Benny Moerdani yang diam-diam mendukung Megawati agar kelak nanti dapat menjadi Ketua Umum PDI, juga tak lepas dari merenggangnya hubungan Panglima ABRI tersebut dengan Presiden Soeharto. Dampak dari dukungan Jenderal Benny Moerdani kepada Megawati dikemudian hari adalah memunculkan dua kekuatan yang bersitegang dalam tubuh ABRI, yakni adanya ABRI Merah Putih (kelompok Benny Moerdani) dengan ABRI Hijau (pemerintah).

Maka tidak heran di awal tahun 1990-an Megawati banyak dikelilingi oleh perwira-perwira ABRI yang bersikap kritis terhadap pemerintah dan ABRI Merah Putih adalah kelompok yang dimaksud. Dukungan tak hanya datang dari sebagian perwira ABRI, namun juga dari DPD/DPC PDI yang merindukan kedamaian di dalam tubuh PDI. Melihat semakin besarnya dukungan terhadap Megawati, membuat Presiden Soeharto khawatir. Apalagi Presiden Soeharto memiliki agenda politiknya sendiri, yakni dengan menyiapkan Siti Hardijanti Rukmana sebagai penerus kejayaan dinasti Orde Baru.

Selanjutnya untuk mengagalkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI, pemerintah kerap kali melakukan rekayasa politik. Namun upaya tersebut kerap kali gagal. Penyebabnya adalah kuatnya kekuatan “arus bawah” yang terus mendukung Megawati. Bahkan Mayjen Agum Gumelar dan Mayjen Hendropriyono sampai harus rela kehilangan jabatan strategis di Angkatan Darat demi mengantarkan Megawati menjadi Ketua Umum PDI.

Puncak dari perseteruan antara pemerintah dengan DPP PDI pro-Megawati terjadi pada 27 Juli 1996. Di dalam peristiwa tersebut diyakini banyak petinggi ABRI yang terlibat. Terutama petinggi ABRI yang berada disekitar Presiden Soeharto. Namun pemerintah beralih jika peristiwa tersebut disebabkan adanya gerakan yang dimotori oleh orang-orang Komunis. Petinggi ABRI yang dinilai tidak berkontribusi pun dicopot jabatannya. Sedangkan PDI setelah terjadi peristiwa tersebut semakin kehilangan pendukungnya, karena basis pendukung terbesar PDI berada di belakang DPP PDI Megawati yang tidak diakui pemerintah.

Setelah mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, nasib bagus menghampiri Megawati beserta pendukung setianya. Pada tahun 1998, PDI pro-Megawati berhasil menyelenggarakan Kongres PDI pada 8-10 Oktober 1998 di Denpasar Bali. Kongres ini merupakan sebuah tanda munculnya supremasi sipil atas negara dan merupakan

kemenangan terbesar bagi partai berlambang banteng tersebut, setelah sebelumnya segala bentuk konflik internalnya selalu diintervensi oleh pemerintah.

Kesimpulan

Terlibatnya militer dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia tidak lepas peran Jenderal A.H.Nasution. Peran Jenderal A.H.Nasution tersebut dituangkan dalam pidatonya yang berjudul “Jalan Tengah” pada bulan November 1958, di Akademi Militer Nasional, Magelang. Isi pidato tersebut menyatakan jika posisi ABRI bukanlah sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan juga bukan “rezim militer” yang sangat mendominasi kekuasaan seperti di negara Amerika Latin. Di awal tahun 1990an, muncul beberapa perwira Angkatan Darat aktif maupun Purnawiraman yang justru mendukung PDI. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan kepada Megawati yang pada saat itu masih sangat minim jam terbang dalam dunia politik. Munculnya dukungan dari beberapa perwira ABRI membuat kekuatan ABRI terpecah menjadi dua, yakni ABRI Merah Putih dan ABRI Hijau.

Puncak dari campur tangan ABRI dalam konflik internal PDI adalah dengan Terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Konflik yang melibatkan DPP PDI Megawati dan DPP PDI Soerjadi ini diduga juga melibatkan pihak eksternal partai, khususnya pemerintah dan ABRI. Banyak petinggi-petinggi ABRI yang terlibat dalam kerusuhan, baik dalam menyusun scenario penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ataupun turun langsung dilapangan untuk memberikan instruksi langsung. Setelah peristiwa tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Pasca 27 Juli 1996, kekuatan PDI hilang akibat adanya dualisme kepemimpinan. Namun kekuatan PDI terbesar berada dalam genggaman Megawati karena didukung oleh banyak pihak dan massa yang besar. Sedangkan Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI yang diakui pemerintah tidak dapat berbuat banyak.

Daftar Pustaka

- Adriana, E. S. 1991. *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. PT. Gramedia.
- Bahar, A. 1996. Megawati Soekarnoputri 1993-1996. In *Megawati Soekarnoputri 1993-1996*. PT. Pena Cendekia.
- David Jenkins. 2010. *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Komunitas Bambu.
- Fattah, A. 2005. *Demi literisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer*. LKIS.

- Haji Said, S. 2016. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Mizan Media Utama.
- Muhaimin, Yahya, A. 2002. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Gadjah Mada University Press.
- Prisma. 1991. *Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia*. LP3ES.
- Salim Said. 2001. *Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini dan Kelak*. Pustaka Sinar Harapan.
- Salim Said. 2002. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Aksara Karunia.
- Singh, B. 1996. *Dwifungsi ABRI: Asal-usul , aktualisasi dan implikasinya bagi stabilitas dan pembangunan*. Gramedia.
- Soebijono, A. S. S. T. 1993. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University.
- Soeharto. 1985. *Amanat Kenegaraan : Kumpulan Pidato Kenegaraan di Depan Sidang DPR*. Indi Dayu Press.
- Syarif, M. M. . 1999. *Berpolitik atau Kembali ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*. Bigraf Publishing.
- Zulkifli, A. 1996. *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.